

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA SEKTOR PEMERINTAH

Hesti Widiyanti¹, Siti Nur Hadiyati², Dewi Sulistyowati³

email : hesti28widiyanti@gmail.com

^{1,3}Dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal

²Dosen Uswagati Cirebon

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual dan latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi bisnis serta ukuran satuan kerja dengan dengan tingkat penerapan akuntansi akrual. Dengan sampel yang diambil adalah 55 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Judgement Sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan uji nilai T, uji nilai F, uji koefisien determinasi.

Hasil perhitungan dengan analisis regresi linear sederhana melalui uji t diperoleh variabel tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, ukuran konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual memiliki koefisien regresi berturut-turut sebesar 0,030 dengan sig sebesar 0,000; -0,500 dengan sig sebesar 0,000 ; dan -0,061 dengan sig sebesar 0,000 ; serta 0,007 dengan sig sebesar 0,017 yang semuanya $< \alpha$ (0,05) dengan demikian terbukti 4 variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual. Sedangkan tiga variabel yang lain yaitu teknologi informasi, latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi bisnis dan ukuran satuan kerja masing-masing memiliki koefisien regresi berturut-turut sebesar 0,001 dengan sig sebesar 0,872; -0,016 dengan sig sebesar 0,124 dan 0,016 dengan sig sebesar 0,348, ketiga variabel tersebut sig $> \alpha$ (0,05) terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel penerapan akuntansi akrual.

Kata Kunci : Analisis, Akuntansi Akrual, Sektor Pemerintah.

1. Pendahuluan

Organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas. Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan istilah New Public Management (NPM).

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian

mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2002).

Menurut Christiaens, et al. (2001; 2003) reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi sektor publik. Tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua manfaat, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk

mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003).

Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan Negara dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Muhamad Indra Yudha Kusuma dan Fuad (2013) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap (Christiaens, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Brusca, 1997).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang

berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan system ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan system akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguji kembali sampai sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual dan menguji pengaruh dari faktor-faktor sumber daya manusia, organisasional dan situasional terhadap implementasi akuntansi akrual pada sektor pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai tingkat adopsi dan implementasi sistem akuntansi akrual pada pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Sektor Pemerintah

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tegal. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi atau keuangan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

A. Metode Pengumpulan Data

(1) Metode Survei

yaitu melalui kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Kuesioner yang akan diberikan adalah jenis pertanyaan tertutup pada beberapa informasi yang diperlukan. kemudian diberikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian tersebut.

(2) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode penelitian dengan cara mempelajari dan membaca

literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang mendukung, termasuk peraturan-peraturan pemerintah daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah.

B. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan analisis data kualitatif. Metoda analisis kuantitatif dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dengan menggunakan pengujian hipotesis. Analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Analisis kualitatif dikembangkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam analisis kuantitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai data yang diolah, seperti nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai tengah (*median*), maksimum, minimum dalam menjawab pertanyaan mengenai Penerapan akuntansi accrual, Tingkat pendidikan staf keuangan, Pelatihan Staf Keuangan, Kualitas teknologi informasi, Dukungan konsultan, Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, Latar belakang pendidikan pimpinan, dan Ukuran satuan kerja.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penerapan akuntansi accrual	15	.00	1.21	3.0060	.24100
Tingkat pendidikan staf keuangan	15	.50	2.50	1.2930	.11486
Pelatihan Staf Keuangan	15	.53	2.54	1.5349	.04746

Kualitas teknologi informasi	15	.34	1.85	1.4761	.04935
Dukungan konsultan	15	.41	2.20	1.1840	.04052
Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual	15	.11	1.17	.1610	.01169
Latar belakang pendidikan pimpinan	15	.01	.210	.1490	.00505
Ukuran satuan kerja	15	.37	.45	3.142	.01021
Valid N (listwise)	15				

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 15 sampel. Variabel Tingkat pendidikan staf keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0.50, nilai maksimum sebesar 2.50, nilai rata-rata sebesar 1.3730 dan dengan *standart deviation* 0.11486. Variabel Pelatihan Staf Keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0.53, nilai maksimum sebesar 2.54, nilai rata-rata sebesar 1.4749 dan dengan *standart deviation* 0.04746. Variabel Kualitas teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 0.34, nilai maksimum sebesar 1.85, nilai rata-rata sebesar 1.3961 dan dengan *standart deviation* 0.04935. Variabel Dukungan konsultan memiliki nilai minimum sebesar 0.41, nilai maksimum sebesar 2.20, nilai rata-rata sebesar 1.0781 dan dengan *standart deviation* 0.04052. Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual memiliki nilai minimum sebesar 0.11, nilai maksimum sebesar 1.17, nilai rata-rata sebesar 0.2619, dan dengan *standart deviation* sebesar 0.01169. Latar belakang pendidikan pimpinan memiliki nilai minimum sebesar 0.01, nilai maksimum sebesar 0.210, nilai rata-rata sebesar 0.0497, dan dengan *standart deviation* 0.0505. Ukuran satuan kerja memiliki nilai minimum sebesar 0.37, nilai maksimum sebesar 0.45, nilai rata-rata sebesar 0.0240, dan dengan *standart deviation* 0.01021.

Variabel Penerapan akuntansi accrual memiliki nilai minimum sebesar 1.03, nilai maksimum sebesar 1.21, nilai rata-rata sebesar 0.0060 dan dengan *standart deviation* 0.17254.

Dari statistik deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada SKPD Kab. Tegal masih sangat rendah, yaitu sebesar 30,06%. Hal itu dikarenakan Tingkat pendidikan staf keuangan rata-rata sebesar 12.93 %, Pelatihan Staf Keuangan 15.34 %, Kualitas teknologi informasi 14.76 %, Dukungan konsultan 11.84 %, Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual 1.61 %, Latar belakang pendidikan pimpinan 1.49 %, Ukuran satuan kerja 3.14 %.

B. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika memiliki data distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas digunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* (KS). Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	.03744767
	Deviat ion	
Most Extreme Differences	Absol ute	.037
	Positi ve	.035
	Negati ve	-.037
Kolmogorov-Smirnov Z		.416
Asymp. Sig. (2-tailed)		.995

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel.2. dimana menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.995 > α (0.05) yang artinya data berdistribusi normal.

2) Uji Heterokedastisitas

3) Uji Heterokedastisitas di maksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain, jika varian berbeda maka menunjukkan terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka terjadi homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Alni, 2007 dalam Dwi, 2008). Dengan asumsi jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser. hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari alpha (0.05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

4) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik maka tidak terjadi multikolonieritas. Untuk dapat menguji ada atau tidaknya multikolonieritas dengan ketentuan sebagai berikut: Multikolinearitas dapat juga dilihat dari VIF dan toleransi, Jika $VIF < 10$ dan nilai $TOL > 0,1$ maka tingkat kolinearitas dapat ditoleransi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Tingkat pendidikan staf keuangan	0.651	1.536	Tidak terjadi multikolinearitas
Pelatihan staf keuangan	0.894	1.118	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas teknologi informasi	0.580	1.724	Tidak terjadi multikolinearitas
Dukungan konsultan	0.471	1.530	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual	0.474	1.730	Tidak terjadi multikolinearitas
Latar belakang pendidikan pimpinan	0.416	1.620	Tidak terjadi multikolinearitas
Ukuran satuan kerja	0.839	1.192	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari besarnya nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

5) Uji Hipotesis dan Analisis Data

Pada penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) pada SPSS dan *Microsoft Excel*. Regresi berganda merupakan suatu model analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

6) Uji Nilai T (T-test)

Uji nilai T bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria hipotesis diterima Jika $\text{sig} < \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis. Dari Tabel 4. dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,004 + 0,030 - 0,500 + 0,001 - 0,61 + 0,007 - 0,016 + 0,16$$

Tabel 4. Hasil Uji Nilai t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.004	.046		-.092
	Tingkat pendidikan staf keuangan	.030	.009	.212	3.544
	Pelatihan staf keuangan	-.500	.030	-.876	-16.664
	Kualitas teknologi informasi	.001	.008	.008	.149
	Dukungan konsultan	-.061	.008	-.364	-7.334
	Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual	.007	.003	.151	2.384
	Latar belakang pendidikan pimpinan	-.016	.011	-.079	-1.551
	Ukuran satuan kerja	.016	.042	.474	3.520

a. Dependent Variable: penerapan akuntansi accrual
Sumber: Hasil Olah Data

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Satu

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Tingkat pendidikan staf keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.030 dengan signifikansi sebesar $0.000 < \alpha$ (0.05) sehingga variabel Tingkat pendidikan staf keuangan terbukti berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis satu didukung.

b. Pengujian Hipotesis Dua

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Pelatihan staf keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.500 dengan signifikansi sebesar $0.000 < \alpha$ (0.05) sehingga variabel Pelatihan staf keuangan terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis dua didukung.

c. Pengujian Hipotesis Tiga

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Kualitas teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.001 dengan signifikansi sebesar $0.872 > \alpha (0.05)$ sehingga variabel Kualitas teknologi informasi terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis tiga ditolak.

d. Pengujian Hipotesis Empat

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel Dukungan konsultan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.061 dengan signifikansi sebesar $0.000 < \alpha (0.05)$ sehingga variabel Dukungan konsultan terbukti berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis empat didukung.

e. Pengujian Hipotesis Lima

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.007 dengan signifikansi sebesar $0.017 < \alpha (0.05)$ sehingga variabel Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terbukti berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis lima didukung.

f. Pengujian Hipotesis Enam

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Latar belakang pendidikan pimpinan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.016 dengan signifikansi sebesar $0.124 > \alpha (0.05)$ sehingga variabel Latar belakang pendidikan pimpinan terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis enam ditolak.

g. Pengujian Hipotesis Tujuh

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Ukuran satuan kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.016 dengan signifikansi sebesar $0.348 > \alpha (0.05)$ sehingga variabel Ukuran satuan kerja terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual, dengan demikian hipotesis tujuh ditolak.

7) Uji Nilai F

Uji F (uji statistik secara serentak) bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh

secara bersama-sama variabel X terhadap Y. Jika nilai sig F < α 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Nilai F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.455	6	.076	51.520	.000 ^a
Residual	.179	122	.001		
Total	.634	128			

- a. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan, ukuran satuan kerja
- b. Dependent Variable: penerapan akuntansi accrual
- Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai F test sebesar 51.520 dan nilai signifikansi ($0.000 < \alpha (0.05)$) yang artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen dalam hal ini tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan, ukuran satuan kerja terhadap variabel dependen yaitu Penerapan akuntansi akrual.

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) atau *Adjusted R Square* digunakan untuk mengukur proporsi variasi variabel terikat (variabel dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (variabel independen). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan menunjukkan bahwa model estimasi (model regresi) semakin kecil (Wihandaru, 2004 dalam Yudanto 2011). Nilai koefisien dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* tergantung dari model regresi yang digunakan. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat

sangat terbatas, begitu pula sebaliknya (Indriani, 2010). Untuk regresi sederhana menggunakan *R Square* dan regresi berganda menggunakan *Adjusted R Square*.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.748 ^a	.618	.604	.03746	2.053
a. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan, ukuran satuan kerja					
b. Dependent Variable: penerapan akuntansi accrual					
Sumber: Hasil Olah Data					

Berdasarkan Tabel 6 tampak bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0.604 atau 60.4%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah kualitas audit, ukuran komite audit, ukuran perusahaan dan arus kas operasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *discretionary accruals* sebesar 60.4 %, sedangkan sisanya sebesar 39.6 % (100%-60.4 %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Tingkat pendidikan staf keuangan terbukti berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akrual
- 2). Pelatihan staf keuangan terbukti tidak berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akrual
- 3). Kualitas teknologi informasi terbukti tidak berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akrual
- 4). Dukungan konsultan terbukti berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akrual
- 5). Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terbukti berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual

- 6). Latar belakang pendidikan pimpinan terbukti tidak berpengaruh terhadap Penerapan akuntansi akrual
- 7). Ukuran satuan kerja terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel Penerapan akuntansi akrual
- 8). Tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, latar belakang pendidikan pimpinan, ukuran satuan kerja berpengaruh secara bersama – sama terhadap penerapan akuntansi akrual.

5. Daftar Pustaka

- [1]. Bastian, I, 2007. “ Sistem Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- [2]. Cohen, S, Kaimenaki E. And Zorgios, Y, 2007, “Assesing IT as key success factor for accrual accounting implementation in greek municipalities”, financial accountability and management, vol 23 no1, pp.91-111.
- [3]. Emsley, D, Nevicky, B. And Zorgios, Y., 2006, “ Effect of cognitive style and professional development on the initiation of radical and non radical management accounting innovations”, accounting and finance, vol 46 no 2, pp. 243-264.
- [4]. Kusuma M., I., Y., dan Fuad, 2013, Analisis factor-factor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah, Diponegoro journal accounting reasearch, vol 2 no 3, pp 1-14.
- [5]. Mardiasmo, 2009, “ akuntansi sektor publik”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- [6]. Ouda, H, 2008, “ Toward a generic model for government sector reform : the new zealand experience”, international journal on governmental financial management, vol.8. no 2, pp.78-100.
- [7]. Stamadiadis, F., Erotis, N, and Vasiliou, D, 2009, “ Assesing accrual accounting Reform in greek public hospitals: An empirical investigation”. International journal of economic science and applied reaserch, vol. 4 no1, pp 153-184.

- [8]. Undang-undang Republik Indonesia no 17 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- [9]. Undang-undang Republik Indonesia no 15 tahun 2005 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- [10]. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.